



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANDRA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 692883

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.047.000.000**

1. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.077 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.947.000.000
3. Tanah Seluas 50.864 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
4. Tanah Seluas 23.120 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **86.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 100 D (SUPRA X) Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **47.250.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **113.817.295**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

4.294.067.295

III. HUTANG

Rp.

67.259.690

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.226.807.605

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.